



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI STUNTING DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Iqbal Firman Nugraha¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya” Fenomena masalah penelitian aspek peran pemerintah, tingginya angka stunting yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan menempati angka ke dua tertinggi skala Jawa Barat merupakan suatu hambatan untuk meningkatkan suatu pembangunan yang berkualitas. Rumusan masalah bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam menekan angka stunting. Tujuan penelitian ini untuk, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya dalam menekan angka stunting. Dimensi grand teori dari Ryaas Rasyid dalam (Fitriyah 2019:28) peran pemerintah, pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator. Teknik pengumpulan data yang digunakan, studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Informan penelitian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang PPM, Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Hasil penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya dikatakan kurang optimal atau bisa dikatakan masih fifty-fifty, kurangnya keseriusan dan kolaborasi yang dilakukan untuk menangani stunting. Peran dari dinas kesehatan dalam menanggapi stunting ini hanya bisa mencapai di angka 30 persen, harus ada kolaborasi, sinergitas dari pihak lain.

Kata kunci : Peran pemerintah, penanganan stunting, pembangunan

ABSTRACT

"The Role of Local Government in Measuring Stunting in Tasikmalaya Regency" The phenomenon of aspects of the research aspect of the government's role, the high stunting rate in Tasikmalaya Regency which occupies the second highest number on the West Java scale is an obstacle to improving quality development. Formulation of the problem of how the Tasikmalaya District Health Office can reduce stunting rates. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the local government in slow stunting in Tasikmalaya district in reducing stunting rates. The grand dimension of research theory is the role of government, government as regulator, government role as dynamicator, government role as facilitator. The data collection techniques used were literature studies and field studies (observations, interviews, documentation). Data analysis using data reduction analysis, data presentation, draw

conclusions. Research informants Head of Health Service, Head of Disease Prevention, Head of Public Health, Head of PPM, PKK Cadres, Community Leaders, Community. The results of the research on the Role of Local Government in Handling Stunting in Tasikmalaya Regency are said to be less than optimal or it can be said that it is still fifty-fifty, a lack of seriousness and collaboration being carried out to deal with stunting. The role of the health office in dealing with stunting can only reach 30 percent, there must be collaboration and synergy from other parties.

Keywords: *Government role, reduce the stunting rate, regional quality development*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terbesar di benua Asia, bahkan dunia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 272.229.372 juta jiwa. Sangat memungkinkan terjadi berbagai hal dilihat dari banyaknya penduduk yang ada di Indonesia. Mulai dari tahun 2019 pemerintah merencanakan mewujudkan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki kapasitas manusia yang tinggi atau dengan kata lain pembangunan manusia. Serta pemerintah memiliki keinginan meningkatkan standar masyarakat Indonesia.

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita, usia masuk sekolah baik pada lakilaki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi dan tingginya angka putus sekolah. Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi dapat memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, menghadapi tantangan berat dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas¹⁸. Dalam konteks Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi. Data tahun 2020-2022 menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya berada di peringkat ke-4 dengan prevalensi stunting 27,2%, jauh di atas target nasional 14% pada tahun 2024.

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam bidang kesehatan sesuai UU No. 36 Tahun 2009. Sebagai respons terhadap tingginya angka stunting, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya:

1. Angka stunting masih tinggi;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat;
3. Minimnya koordinasi dan kolaborasi antar-instansi (Dinas Kesehatan, Bappeda, dll).
4. Pola asuh orang tua yang belum maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi regulasi, dinamisasi, dan fasilitasi guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mempercepat penurunan angka stunting.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. Mengatakan didalam aturan tersebut menyebutkan bahwa masih tingginya angka prevelensi stunting pada balita di Kabupaten Tasikmlaya dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualias sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan angka stunting yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi, berdasarkan data pada tahun 2019 angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi yaitu di angka 33,8 persen. Sementara itu data di bulan agustus tahun 2020 angka prevelensi masih cukup tinggi di atas 20 persen. Berikut ini ada beberapa Desa yang angka stunting nya masih cukup tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses-proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan menggunakan metode dan teknik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah hal ini sejalan menurut pendapat Robert Bodgam dan Taylor (dalam Melong, 2008:6) Adapun jenis pendekatan penulisan ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Menurut Melong (2008:3) menyatakan bahwa: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau liisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam menangani stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Unit Analisis dan Informan:

Unit analisisnya adalah Peran Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) dalam menangani stunting. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang PPM (Bappelitbangda), Kader PKK, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui:

1. Studi Pustaka ialah Mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan peran pemerintah dan stunting.
2. Studi Lapangan yaitu meliputi, Observasi ialah Pengamatan langsung terhadap kegiatan penanganan stunting. Wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen dan data-data terkait prevalensi dan program stunting.
3. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang meliputi tiga tahapan: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya memiliki suatu acuan dari Peraturan Bupati Tasikmalaya, dalam permasalahan disini yaitu Kabupaten Tasikmalaya menduduki peringkat 5 besar angka stunting paling tinggi di Jawa Barat, minimnya pengetahuan dari masyarakat terhadap penyakit stunting, permasalahan yang ketiga adalah kolaborasi antara dinas kesehatan dan lembaga instansi yang minim dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan tersebut akhirnya peneliti angkat menjadi sebuah penelitian dan penelitian kaitkan dengan teori tentang peran pemerintah yang di ungkapkan oleh Ryaas Rasyid (2010), bahwasannya dalam peran pemerintah daerah terdapat tiga variabel yaitu pemerintah sebagai fasilitator (SDM, ASN, Kekuatan anggaran pemerintah, koordinasi antar pelaksana),

pemerintah sebagai regulator (perumusan aturan, peraturan-peraturan), pemerintah sebagai dinamisator (partisipasi masyarakat, satu variabel yang sangat berdampak yaitu pemerintah sebagai fasilitator, yang dimaksud pemerintah sebagai fasilitator ini yaitu kualitas sdm dan asn didalam instansi tersebut.

Selanjutnya peran pemerintah sebagai regulator, dalam regulasi atau suatu aturan yang dibuat pemerintah harus terimplementasikan dengan baik agar program atau aturan tersebut bisa berjalan secara efektif. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga instansi bagi keberhasilan suatu program. Variabel selanjutnya yaitu pemerintah sebagai dinamisator bahwa pemerintah harus bisa menggerakkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Dalam pembahasan disini, peneliti akan membahas suatu hasil observasi lapangan dan juga hasil wawancara di sini dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti di mana peneliti menggunakan suatu teori dari Ryaas Rasyid. Bahwasanya mengungkapkan terdapat variabel tentang peran pemerintah yaitu yang pertama peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Menurut peneliti di sini penelitian peneliti tentang suatu peran pemerintah daerah dalam menangani stunting di Kabupaten Tasikmalaya sangat relevan dengan teori dari Ryaas Rasyid.

Peran Pemerintah Daerah dianalisis berdasarkan tiga dimensi teori Ryaas Rasyid:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator (Kebijakan)

Peran Pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. Peran pemerintah dalam menentukan arah kebijakan sangat penting untuk menunjang kualitas pembangunan yang terarah dan sistematis.

Perihal Implementasi dari kebijakan tentang percepatan penurunan stunting sebenarnya disini pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan sudah

memiliki acuan yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tentang Penurunan Stunting, cara dinas mengimplementasikan hal tersebut yaitu dengan cara mengsosialisasikan terhadap masyarakat, remaja yang mau menuju ke pernikahan untuk diberikan semacam obat terlebih dahulu. Pemerintah Daerah telah menetapkan arah kebijakan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. Implementasi kebijakan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui sosialisasi, aksi konvergensi stunting, pemberian tablet gizi untuk remaja, serta penimbangan dan pengukuran balita di Posyandu.

Berikut Hambatan yang terjadi pada variabel ini adalah :

- Minimnya kolaborasi antar-instansi yang terkait (Dinas Kesehatan, Bappeda, dll). Kurangnya koordinasi menyebabkan setiap instansi berjalan dengan programnya masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan peran dinas hanya berdampak 30% tanpa kolaborasi. Keluhan masyarakat mengenai implementasi yang belum optimal dan kurangnya bantuan (sembako) dari pemerintah.
- Edukasi yang dilakukan masih belum optimal sehingga penurunan angka stunting ini masih belum efektif.
- Tingginya angka pengangguran yang salah satunya berakibat pada faktor ekonomi keluarga.

Dalam menangani permasalahan stunting ini pemerintah daerah harus melakukan upaya pencegahan yang efektif Menurut peneliti di sini adalah ketika Dinas Kesehatan bertindak secara serius dalam menangani permasalahan stunting ini maka target secara nasional yaitu diangka 14 persen, sesuai dengan terget dari pusat untuk mengintervensi ke setiap daerah kabupaten atau kota. Ketika peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan terhadap masyarakat setempat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang stunting ini, seharusnya pihak Dinas Kesehatan harus lebih peka terhadap realitas dilapangan. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang seharusnya dilakukan secara bertahap agar masyarakat lebih paham untuk mencegah agar tidak terkena stunting.

Selain itu peneliti menganalisi ketika observasi di lapangan kurangnya edukasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat

dalam hal stunting ini masih acuh tak acuh untuk mencegah stunting ini. selain itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang sehingga karena dalam hal anggaran yang seharusnya untuk kebutuhan 3 bulan kedepan tetapi yang terjadi dilapangan hanya cukup untuk satu bulan saja.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator (Penggerak Partisipasi)

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak mendorong dan memelihara dinamika pembanguan daerah. Peran pemerintah sebagai dinasmisator ini pemerintah harus bisa menjadi penggerak atau pemerintah harus inovatif dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan terutama stunting karena akan sangat berdampak terhadap orang yang terkena penyakit setunting. Peran disini pemerintah harus bisa menjadi suatu problem solving dalam setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik permasalahan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Menurut peneliti disini, Dinas Kesehatan dalam upaya menggerakkan partisipasi dari masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan masih kurang karena masih terhambat oleh biaya, dalam hal ini anggaran yang ada juga belum cukup untuk menangani stunting, karena secara anggaran masih kurang dan alat kesehatan juga masih menggunakan alat yang tersedia di lingkungan dinas kesehatan. Peran ini menuntut pemerintah untuk menggerakkan partisipasi multi-pihak dalam mendorong dinamika pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk radio dan Kader PKK.

Berikut Hambatan yang terjadi di lapangan pada variabel ini, Partisipasi masyarakat yang masih minim. Hal ini terlihat dari rendahnya kehadiran ibu balita ke Posyandu. Respon masyarakat yang kurang peduli dan sering mengeluhkan kurangnya bantuan. Anggaran untuk penanganan stunting masih dinilai kurang. Kurangnya kecakapan komunikasi Kader PKK saat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada orang tua balita.

tetapi dalam hal penekan atau pemberian edukasi yang bersifat intensif masih minim sehingga masyarakat masih bersifat acuh dalam hal stunting ini. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan harus bersikap tegas dan serius dalam menyelesaikan permasalahan stunting ini karena taraf dari suatu kabupaten atau kota bisa dilihat dari kondisi kesehatan masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator (Penciptaan Kondisi Kondusif)

Peran ini berfokus pada penyediaan sarana, prasarana, pelatihan, dan jaminan kesehatan untuk menyejahterakan masyarakat⁴⁶⁴⁶. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi antar lembaga dan pelaksanaan 8 konvergensi stunting sesuai arahan pemerintah pusat, dengan menekankan pendekatan *pentahelix* (melibatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, Bappeda, dan masyarakat).

Hambatan Meskipun Dinas Kesehatan telah melakukan upaya edukasi, perlunya penyediaan sarana, prasarana, dan jaminan kesehatan yang memadai masih perlu ditingkatkan agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Pada variabel yang peneliti gunakan dalam teori Ryas Rasyid yaitu peran pemerintah sebagai dinamisator yang dimana pemerintah harus menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendorong serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Selain itu pemerintah juga harus memberikan atau membina masyarakat secara intensif.

Membicarakan hal ini ketika peneliti melakukan observasi serta melihat kondisi yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sudah baik, dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mencegah supaya menjaga kesehatan agar terhindar dari masalah stunting. Selain itu ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan dari Dinas Kesehatan pihak dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi juga ke SMA atau SMK yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Peran Pemerintah Daerah dalam menangani stunting di Kabupaten Tasikmalaya, yang diukur melalui dimensi Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator, secara umum dinilai kurang optimal. Hambatan utama terletak pada minimnya kolaborasi dan sinergitas antar-instansi terkait, yang menyebabkan upaya penanganan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan hanya berdampak 30%. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Fasilitas yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya masih belum lengkap sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam upaya pencegahan stunting ini, selain dari itu tingginya angka pengangguran yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan stunting yang terjadi di lapangan. Upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi, edukasi, dan penimbangan balita, namun belum mampu menekan angka stunting secara signifikan untuk mencapai target nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kencana Syafie, Inu. 2007. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika.
- Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta: 2009
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung: Ramadan
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya